



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TEGUH SETYABUDI**
2. Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL**
3. NHK : **145351**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 6.117.600.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 207 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HIBAH TANPA AKTA Rp. 3.100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/54 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/75 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 913 m2/150 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 682 m2/60 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m2/33 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
7. Tanah Seluas 2900 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.142.600.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 235.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA COROLLA ALTIS SEDAN Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOBIL, LAND ROVER JEEP Tahun 1974, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
3. MOBIL, TOYOTA JEEP Tahun 1962, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000



4. MOBIL, HONDA CIVIC MOBIL Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
85.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	275.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	933.385.905
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	7.560.985.905
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	7.560.985.905

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.